

# Evaluasi Kawasan Kumuh Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Padei Laut, Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali)

Rahmat Aris Pratomo <sup>1,\*</sup>, Khairinrahmat <sup>2</sup>, Rezki Awalia <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan.

<sup>2</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Tadulako.

\*Corresponding author: [r.a.pratomo@lecturer.itk.ac.id](mailto:r.a.pratomo@lecturer.itk.ac.id)

Diterima 25 April 2022 | Disetujui 10 Juli 2022 | Diterbitkan 22 Agustus 2022

DOI <https://doi.org/10.35718/compact.v1i1.735>

## Abstrak

Permukiman kumuh menjadi salah satu masalah kompleks dalam penataan ruang. Penanganan kawasan ini juga sekaligus merupakan perwujudan salah satu upaya bersama para pelaku pembangunan dalam mencapai perkembangan kota yang berkelanjutan. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dan holistik didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu. Pemerintah Indonesia saat ini telah berupaya keras dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh dengan salah satu programnya yaitu “zero kumuh”. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 41% dari keseluruhan pulaunya di huni oleh masyarakat, pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia tentu saja menghadapi tantangan yang sangat besar, termasuk permasalahan permukiman kumuh. Bahkan, masalah kumuh ini tampak telah menjadi masalah laten yang dialami oleh pulau-pulau kecil, tidak terkecuali di Padei laut, Menui Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kekumuhan permukiman di pulau-pulau kecil dengan fokus terhadap aspek fisik dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan Teknik analisis skoring mengacu pada Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 sebagai standar penilaian tingkat prioritas kekumuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan permukiman kumuh Padei Laut adalah prioritas 2 yang berarti klasifikasi kumuh sedang. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman terhadap karakteristik permukiman kumuh di wilayah pulau-pulau kecil.

**Kata-kunci** : Permukiman kumuh, Pulau-pulau kecil, Prioritas, Padei Laut, Morowali

## *Evaluation of Slum Areas in Small Islands (Case Study: Slum Areas of Padei Laut, Menui Islands, Morowali Regency)*

### *Abstract*

*Slums have become one of the complex problems in spatial planning. In order to achieve livable settlements, comprehensive and collaborative approaches are required to manage slum areas, supported by an integrated management plan. The Indonesian government has been working seriously to deal with slum issues by performing a program, namely “zero slums”. However, as the largest archipelagic country in the world, with approximately 41% of the entire island inhabited by the community, the development of small islands in Indonesia certainly faces enormous challenges, including the problem of slums. In fact, this problem seems to have become a latent problem, as also seen in Padei Laut, Menui Islands. This study aims to evaluate the level of slum areas on small islands with a focus on physical and environmental aspects. We used a quantitative method by conducting a scoring analysis for assessing the priority level of slums based on physical and environmental aspects using the Minister of PUPR Regulation Number*

14/PRT/M/2018 standard. The research findings show that the level of slums in the Padei Laut is categorized as priority 2, which means moderate classification. This research is expected to enrich the understanding of the characteristics of slum areas on small islands.

**Keywords :** slum areas, small islands, priority, Padei Laut, Morowali

## A. Pendahuluan

Permukiman kumuh menjadi salah satu masalah kompleks dalam penataan ruang. Permukiman kumuh adalah tantangan yang paling sering dihadapi oleh suatu kawasan permukiman yang meliputi permasalahan ekonomi, lingkungan, maupun sosial (Christiawan, 2017). Penanganan kawasan ini juga sekaligus merupakan perwujudan salah satu upaya bersama para pelaku pembangunan dalam mencapai perkembangan kota yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk menjamin terwujudnya hunian yang terjangkau dan layak huni dalam lingkungan yang berkelanjutan, terencana, teratur, terpadu, sehat, aman, dan serasi. Penanganan permukiman kumuh telah ditetapkan Pemerintah sebagai target nasional melalui salah satunya adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha. Selain itu, penanganan permukiman kumuh mampu mencerminkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan tujuan 11 *Sustainable Development Goal's* (SDGs) yaitu *sustainable cities and communities* dan komitmen global pada *New Urban Agenda*/NUA untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kewenangannya pemerintah daerah perlu melaksanakan standar pelayanan minimal penanganan permukiman kumuh. Dalam upaya mewujudkan permukiman layak huni, maka dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu (As' ari, & Fadjarajani, 2018; Wijaya, 2016). Pemerintah Indonesia telah berupaya keras menangani perumahan dan permukiman kumuh dengan salah satu programnya yaitu "zero kumuh". Langkah awal telah dimulai dengan menyusun road map penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pulau-pulau kecil dapat di pahami sebagai gugusan pulau dengan luas masing-masing pulau lebih kecil atau beserta keseluruhan ekosistemnya adalah sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (Hehanusa & Bakti, 2004). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 41% dari keseluruhan pularunya di huni oleh masyarakat, pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia tentu saja menghadapi tantangan yang sangat besar (Sumawijaya & Suherman, 2005; Falkland, 1991). Meskipun saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam melihat pulau-pulau kecil ini tidak sebagai kawasan belakang, namun tidak sedikit implementasi di lapangan masih menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan fasilitas dan infrastruktur permukiman. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya permasalahan permukiman di pulau-pulau kecil (Rosmansyah, & Suska, 2020). sehingga masalah kumuh ini tampak telah menjadi masalah laten yang dialami oleh kawasan pesisir terutama di pulau-pulau kecil. Kondisi ini juga dialami oleh mereka yang mendiami permukiman Padei laut yang merupakan bagian dari sebuah desa pada gugusan pulau kecil di Kecamatan Menui Kepulauan. Desa ini tepatnya terletak pada Pulau Padei Kecil yang merupakan salah satu pulau terkecil pada gugusan kepulauan ini. Mayoritas penduduk di desa Padei laut bermatapencaharian sebagai nelayan. Ini tentu saja sama halnya dengan karakteristik social ekonomi masyarakat pesisir lainnya di Indonesia (Wijayanti & Pratomo, 2016).

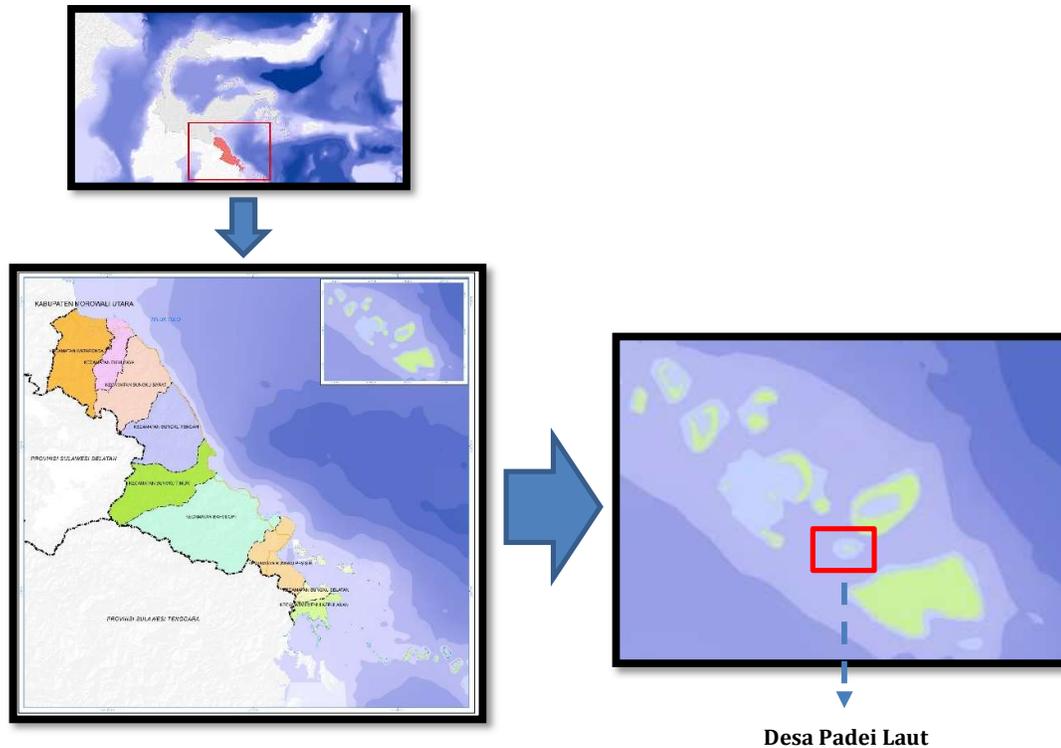
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kekumuhan permukiman di pulau-pulau kecil. Peneliti fokus untuk menilai tingkat prioritas kekumuhan permukiman berdasarkan aspek fisik dan lingkungan yang ada di Desa Padei Laut, Menui Kepulauan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap karakteristik permukiman kumuh di wilayah pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan, artikel ini akan tersusun dalam lima bagian. Setelah penjelasan umum mengenai rasionalitas yang melatarbelakangi kenapa penelitian ini dilakukan, bagian 2 akan berisi mengenai metode yang dilakukan, termasuk jenis data dan cara pengumpulan datanya. Selain itu, teknik analisis penilaian permukiman kumuh dijelaskan pada bagian ini. Bagian ini akan diikuti oleh temuan utama penelitian terkait identifikasi kawasan kumuh dan penilaian tingkat kekumuhan permukiman di Kecamatan Menui Kepulauan dan kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil temuan tersebut.

## B. Data dan Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggambarkan secara deskriptif kondisi eksisting fisik dan lingkungan permukiman kumuh di Desa Padei Barat. Untuk penjelasan lebih detail mengenai lokasi penelitian, pengumpulan data dan teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada penjelasan bertahap di bawah ini.

1. Lokasi Penelitian

Secara geografis Kawasan Kumuh Padei Laut berada di Kecamatan Menui Kepulauan dengan koordinat 3°32'43.24"S LS dan 123°2'11.98"E BT. Padei Laut merupakan satu diantara 24 desa di Kecamatan Menui Kepulauan dengan total wilayah seluas 4.04 Km<sup>2</sup>. Untuk mencapai Padei laut, dibutuhkan perjalanan sejauh 7 Km melewati laut menuju Pulau Padei kecil dari Ulunambo, ibukota Kecamatan Menui Kepulauan. Untuk lebih jelasnya, lokasi Padei Laut di visualisasikan pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Lokasi Desa Padei Laut  
Sumber : Penulis, 2021

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan secara primer maupun sekunder. Survei primer yang dilakukan terbagi atas aktivitas wawancara dan obeservasi lapangan. Proses memperoleh data primer ini dipersiapkan, diorganisasikan, dan dilaksanakan oleh peneliti untuk memperoleh seluruh informasi mengenai variabel identifikasi kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, survei sekunder dilakukan dengan cara mngumpulkan data-data instansi terkait dokumen tertulis yang dapat digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Berikut ringkasan cara pengumpulan data terhadap variable-variabel yang diidentifikasi.

Tabel 1. Kebutuhan Data

No	Data	Sumber Data
1.	Kondisi bangunan gedung	Dokumen RTRW, RDTR & RTBL, Observasi Lapangan, Peta Lokasi
2.	Kondisi jalan lingkungan	Wawancara, Observasi Lapangan
3.	Kondisi penyediaan air minum	Wawancara, Observasi Lapangan
4.	Kondisi drainase lingkungan	Wawancara, Observasi Lapangan
5.	Kondisi pemeliharaan air limbah	Wawancara, Observasi Lapangan
6.	Kondisi pengolahan persampahan	Wawancara, Observasi Lapangan
7.	Kondisi proteksi kebakaran	Wawancara, Observasi Lapangan

Sumber : Penulis, 2021

3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi prioritas tingkat kekumuhan adalah dengan metode skoring. Interval nilai yang di gunakan adalah 1, 3, dan 5. Interval ini di gunakan mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Untuk lebih jelas mengenai kriteria dan parameter penilaian dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2** Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Prioritas Permukiman Kumuh berdasarkan aspek fisik dan lingkungan

No	Kondisi	Kriteria	Indikator	Nilai		
1	Bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan	Persentase bangunan tidak beraturan adalah 25 -50%	1		
			Persentase bangunan tidak beraturan adalah 51 - 75%	3		
			Persentase bangunan tidak beraturan adalah 76 - 100%	5		
		Tingkat kepadatan bangunan	Persentase kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan adalah 25 - 50%	1		
			Persentase kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan adalah 51 - 75%	3		
			Persentase kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan adalah 76 - 100%	5		
		Ketidaksesuaian dengan standar persyaratan teknis	Persentase total bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah 25 - 50%	1		
			Persentase total bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah 51 - 75%	3		
			Persentase total bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah 76 - 100%	5		
2	Jalan lingkungan	Luas area yang tidak terlayani jaringan jalan lingkungan	Persentase total area yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan adalah 25 - 50%	1		
			Persentase total area yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan adalah 51 - 75%	3		
			Persentase total area yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan adalah 76 - 100%	5		
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Persentase total area yang tidak terlayani kualitas permukaan jalan yang baik adalah 25 - 50%	1		
			Persentase total area yang tidak terlayani kualitas permukaan jalan yang baik adalah 51 - 75%	3		
			Persentase total area yang tidak terlayani kualitas permukaan jalan yang baik adalah 76 - 100%	5		
		3	Penyediaan air minum	Ketidaktertersediaannya akses air minum yang aman	Persentase penduduk yang tidak memperoleh akses air minum yang aman adalah 25 - 50%	1
					Persentase penduduk yang tidak memperoleh akses air minum yang aman adalah 51 - 75%	3
					Persentase penduduk yang tidak memperoleh akses air minum yang aman adalah 76 - 100%	5
Ketidakterpenuhan kebutuhan air minum minimal tiap individu	Persentasi penduduk yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya adalah 25 - 50%			1		
	Persentasi penduduk yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya adalah 51 - 75%			3		

No	Kondisi	Kriteria	Indikator	Nilai
			Persentase penduduk yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya adalah 76 - 100%	5
4	Drainase lingkungan	Ketidakmampuan limpasan air untuk dialirkan	Persentase area yang mengalami genangan lebih dari 30 cm, lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun adalah 25 - 50%	1
			Persentase area yang mengalami genangan lebih dari 30 cm, lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun adalah 51 - 75%	3
			Persentase area yang mengalami genangan lebih dari 30 cm, lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun adalah 76 - 100%	5
		Ketidakterhubungan drainase lingkungan dengan sistem drainase kota	Persentase drainase lingkungan yang tidak terhubung dengan tingkatan kelas drainase di atasnya adalah sebesar 25 - 50%	1
			Persentase drainase lingkungan yang tidak terhubung dengan tingkatan kelas drainase di atasnya adalah sebesar 51 - 75%	3
			Persentase drainase lingkungan yang tidak terhubung dengan tingkatan kelas drainase di atasnya adalah sebesar 76 - 100%	5
		Kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk	Persentase kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk sebesar 25 - 50%	1
			Persentase kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk sebesar 51 - 75%	3
			Persentase kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk sebesar 76 - 100%	5
		5	Pemeliharaan air limbah	Ketidaksesuaian sistem pengolahan air limbah dengan standar teknis yang berlaku
Persentase keseluruhan sistem air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis adalah 51 - 75%	3			
Persentase keseluruhan sistem air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis adalah 76 - 100%	5			
Ketidakterpenuhinya persyaratan teknis untuk sarana dan prasarana pengolahan air limbah	Persentase total sarpras air limbah yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis adalah sebesar 25 - 50%			1
	Persentase total sarpras air limbah yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis adalah sebesar 51 - 75%			3
	Persentase total sarpras air limbah yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis adalah sebesar 76 - 100%			5
6	Pengolahan persampahan	Ketidaksesuaian sarana dan prasarana persampahan dengan standar persyaratan teknis	Persentase total sarpras pengolahan persampahan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis adalah sebesar 25 - 50%	1
			Persentase total sarpras pengolahan persampahan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis adalah sebesar 51 - 75%	3
			Persentase total sarpras pengolahan persampahan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis adalah sebesar 76 - 100%	5

No	Kondisi	Kriteria	Indikator	Nilai
		Ketidaksesuaian sistem pengolahan sampah dengan standar persyaratan teknis	Persentase sistem persampahan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis sebesar 25 - 50%	1
			Persentase sistem persampahan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis sebesar 51 - 75%	3
			Persentase sistem persampahan yang tidak memenuhi standar persyaratan teknis sebesar 76 - 100%	5
7	Proteksi kebakaran	Ketidakterseediaannya prasarana untuk kebakaran	Persentase jumlah ketidakterseediaan prasarana untuk proteksi kebakaran adalah sebesar 25 - 50%	1
			Persentase jumlah ketidakterseediaan prasarana untuk proteksi kebakaran adalah sebesar 51 - 75%	3
			Persentase jumlah ketidakterseediaan prasarana untuk proteksi kebakaran adalah sebesar 76 - 100%	5
		Ketidakterseediaan sarana untuk kebakaran	Persentase jumlah ketidakterseediaan sarana untuk proteksi kebakaran adalah 25 - 50%	1
			Persentase jumlah ketidakterseediaan sarana untuk proteksi kebakaran adalah 51 - 75%	3
			Persentase jumlah ketidakterseediaan sarana untuk proteksi kebakaran adalah 76 - 100%	5

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

Berdasarkan hasil proses penilaian tiap kriteria dan indikator di atas, prioritas kekumuhan dapat dikelompokkan menjadi berikut.

**Tabel 3 Klasifikasi dan Skala Prioritas Kekumuhan**

Total Nilai	Klasifikasi	Prioritas Kumuh
16 - 37	Kumuh Ringan	Prioritas 3
38 - 59	Kumuh Sedang	Prioritas 2
60 - 80	Kumuh Berat	Prioritas 1

Sumber: Modifikasi penulis dari Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Karakteristik Permukiman Kumuh Padei laut

Kawasan kumuh Padei Laut memiliki luas 6,8 ha dengan jumlah penduduk 700 jiwa dan 242 KK. Jumlah KK miskin mencapai 115 KK. Sebaran lokasi kawasan kumuh Padei Laut berada di Dusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti pada wilayah lainnya di pulau-pulau kecil dan di pesisir (Wardi dkk, 2014), permukiman di Padei Laut memiliki berkembang secara mengumpul. Sementara itu, secara mendetail, tipologi kawasan kumuh Padei Laut tergolong dalam perumahan dan permukiman kumuh tepi dan atas air. Secara lebih detail karakteristik fisik dan lingkungan permukiman kumuh Padei Laut dapat dilihat uraian berikut ini.

##### a. Kondisi Bangunan Gedung

Mayoritas bangunan di permukiman kumuh Padei Laut berada di sekitar tepi laut. Total jumlah bangunan hunian di kawasan kumuh Padei Laut sebanyak 242 unit dengan kepadatan bangunan 35 unit/ha. Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 115 unit dan jumlah bangunan tidak teratur 59 unit.

**Tabel 4 Kondisi Bangunan di Tiap Dusun Kawasan Kumuh Padei Laut**

Dusun/RT	Jumlah Bangunan Hunian (Unit)	Kepadatan Bangunan (Unit/Hektar)	RTLH (Unit)	Bangunan Tidak Teratur (Unit)
1	46	35	24	11
2	40		10	8
3	49		16	13
4	50		14	21
5	57		51	6
<b>Jumlah Total</b>	<b>242</b>	<b>35</b>	<b>115</b>	<b>59</b>

Sumber : Survei primer, 2021

**Gambar 2. Kondisi Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Padei Laut**

Sumber : Survei primer, 2021

b. Kondisi Jalan Lingkungan

Seluruh perkerasan jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh Padei Laut adalah jenis beton. Permukiman kumuh Padei Laut memiliki jumlah jalan lingkungan sejumlah 4 ruas dengan total panjang jalan 991 m. Berikut merupakan rangkuman kondisi dan pelayanan jalan lingkungan tersebut.

**Tabel 5. Kondisi dan pelayanan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Padei Laut**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Ruas (jumlah ruas)	4
2	Panjang Total Jalan (m)	991
3	Kondisi Jalan:	
	Baik (m)	267
	Rusak (m)	724
4	Permukaan Jalan:	
	Aspal (m)	-
	Beton (m)	991
	Perkerasan Tanah	-
5	Lebar Jalan Lingkungan:	
	1 Sampai 1,5 (m)	-
	2 Sampai 2,5 (m)	991
6	Jumlah Hunian Terlayani Jalan (unit)	239
7	Jumlah Hunian Tidak Terlayani Jalan (unit)	3
8	Luas Area Yang Terlayani Jalan (Ha)	6,8

Sumber : Survei Primer, 2021



**Gambar 3. Kondisi Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Padei Laut**

*Sumber : Survei Primer, 2021*

c. Kondisi Air Minum

Jaringan pelayanan air bersih di permukiman kumuh Padei Laut mencakup ketersediaan dan capaian pelayanan baik untuk konsumsi maupun untuk kegiatan lainnya (masak, mencuci, kakus). Seluruh masyarakat pada permukiman ini memanfaatkan air bersih dari menampung air hujan dan Sebagian kecil memperoleh dari sumur yang debit airnya berkurang drastis, bahkan dalam beberapa periode mengalami kekeringan. Sementara itu, untuk air minum, keseluruhan rumah tangga di permukiman kumuh Padei Laut belum terlayani air minum layak. Sebanyak 242 KK belum terlayani dengan distribusi yang dijelaskan dalam tabel....

**Tabel 6. Kondisi Air Minum di Tiap Dusun Kawasan Kumuh Padei Laut**

Dusun/RT	Terlayani (KK)	Tidak Terlayani (KK)
1	-	46
2	-	40
3	-	49
4	-	50
5	-	57
<b>Jumlah Total</b>	-	<b>242</b>

*Sumber : Survei Primer, 2021*



**Gambar 4. Kondisi Ketersediaan Air bersih di Permukiman Kumuh Padei Laut**

*Sumber : Survei Primer, 2021*

d. Kondisi Drainase Lingkungan

Seluruh kawasan permukiman kumuh Padei Laut tidak terhubung dengan jaringan drainase, karena bangunan berada di atas air dan di tepi laut. Luas area yang tidak terhubung dengan jaringan drainase yaitu 6,8 ha dengan jumlah bangunan 242 unit. Kondisi buangan air limbah dan air buangan permukaan di permukiman kumuh Padei Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Uraian kondisi drainase lingkungan di Kawasan Kumuh Padei Laut**

Uraian		Jumlah
Jumlah Ruas		-
Total Panjang Drainase		-
Klasifikasi Drainase (m)	Primer	-
	Sekunder	-
	Tersier	-
Kondisi Drainase (m)	Baik	-
	Buruk	-
Jumlah bangunan yang tidak terlayani drainase (unit)		242
Luas area yang tidak terlayani drainase (ha)		6,8
Luas area genangan (ha)		0

Sumber : Survei Primer, 2021

**Gambar 5. Ketidakterersediaan Drainase Lingkungan di Kawasan Kumuh Padei Laut**

Sumber : Survei Primer, 2021

e. Kondisi IPAL

Berdasarkan survei dan verifikasi pada kawasan kumuh Padei Laut, rumah tangga sebanyak 84 KK telah memiliki jamban sesuai dengan persyaratan teknis. Sedangkan 158 KK lainnya belum memiliki jamban sesuai dengan persyaratan teknis.

**Tabel 8. Kondisi IPAL di Tiap Dusun Kawasan Kumuh Padei Laut**

Dusun/RT	Terlayani (KK)	Tidak Terlayani (KK)
Dusun 1	19	27
Dusun 2	17	23
Dusun 3	48	1
Dusun 4	0	50
Dusun 5	0	57
<b>Jumlah Total</b>	<b>84</b>	<b>158</b>

Sumber : Survei Primer, 2021

**Gambar 6. Kondisi IPAL di Kawasan Kumuh Padei Laut**

Sumber : Survei Primer, 2021

## f. Kondisi Persampahan

Kawasan kumuh Padei Laut belum dilengkapi dengan sarana prasarana persampahan secara menyeluruh. Sejumlah 242 KK dengan luas 6,8 ha masih membutuhkan tambahan sarana prasarana dan pengangkutan sampah.

**Tabel 9. Kondisi Persampahan di Tiap Dusun Kawasan Kumuh Padei Laut**

Dusun/RT	Terlayani (KK)	Tidak Terlayani (KK)
1	0	46
2	0	40
3	0	49
4	0	50
5	0	57
<b>Jumlah Total</b>	<b>0</b>	<b>242</b>

Sumber : Survei Primer, 2021



**Gambar 7. Kondisi Persampahan di Kawasan Kumuh Padei Laut**

Sumber : Survei Primer, 2021

## g. Proteksi Kebakaran

Seluruh area di kawasan kumuh Padei Laut belum tersedia sarana prasarana proteksi kebakaran. Jarak antar bangunan di kawasan kumuh Padei Laut saling berhimpitan sehingga berpotensi memperparah potensi terjadinya kebakaran. Peran pemerintah yang belum memadai di dalam menyediakan dan mengontrol kebijaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan bangunan terhadap bahaya terjadinya kebakaran.

## 2. Penilaian Prioritas Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Padei Laut

Berdasarkan kondisi karakteristik fisik dan lingkungan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dilakukan penilaian tingkat kekumuhan permukiman berdasarkan aspek fisik dan lingkungan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, sebagaimana terjelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 10. Penilaian Berdasarkan Kriteria dan Indikator Kekumuhan pada Kawasan Kumuh Padei Laut**

No	Kondisi	Kriteria	Jumlah	Persentase	Penilaian
1	Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	59 unit	24%	0
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	35 ha/unit	65%	3
		c. Ketidaksesuaian dengan standar persyaratan	115 unit	48%	1

No	Kondisi	Kriteria	Jumlah	Persentase	Penilaian
		teknis			
2	Jalan lingkungan	a. Luas area yang tidak terlayani jaringan jalan lingkungan	0	0%	0
		b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	742 m	73%	3
3	Penyediaan air minum	a. Ketidaktersediaannya akses air minum yang aman	242 KK	100%	5
		b. Ketidakterpenuhan kebutuhan air minum minimal tiap individu	242 KK	100%	5
4	Drainase lingkungan	a. Ketidakmampuan limpasan air untuk dialirkan	6,8 ha	100%	5
		b. Ketidakterhubungan drainase lingkungan dengan sistem drainase kota	0	0%	0
		c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk	6,8 ha	100%	5
5	Pengelolaan air limbah	a. Ketidaksesuaian sistem pengolahan air limbah dengan standar teknis yang berlaku	158 KK	65%	3
		b. Ketidakterpenuhinya persyaratan teknis untuk sarana dan prasarana pengolahan air limbah	158 KK	65%	3
6	Pengelolaan persampahan	a. Ketidaksesuaian sarana dan prasarana persampahan dengan standar persyaratan teknis	242 KK	100%	5

No	Kondisi	Kriteria	Jumlah	Persentase	Penilaian
		b. Ketidaksesuaian sistem pengolahan sampah dengan standar persyaratan teknis	242 KK	100%	5
7	Kondisi proteksi kebakaran	a. Ketidakterdediaannya prasarana untuk kebakaran	242 KK	1	5
		b. Ketidakterdediaan sarana untuk kebakaran	242 KK	1	5
<b>Total Nilai</b>					<b>53</b>

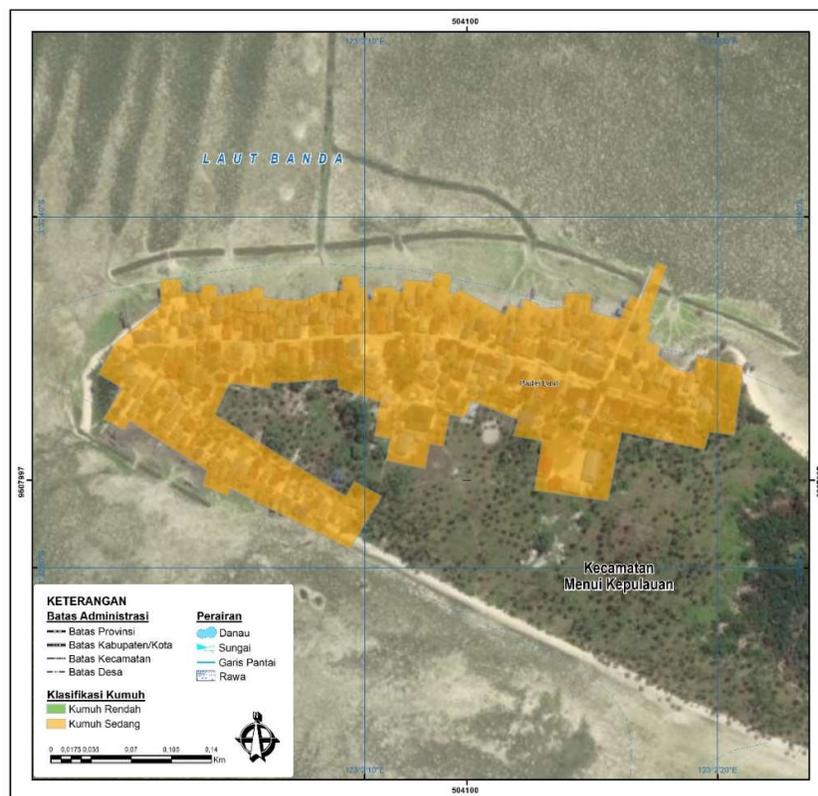
Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel 11. Klasifikasi dan Prioritas Kekumuhan Permukiman Kumuh Padei Laut**

Total Nilai	Kualifikasi	Prioritas Kekumuhan		
		3	2	1
16 – 37	Kumuh Ringan			
38 – 59	Kumuh Sedang		X	
60 – 80	Kumuh Berat			

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan penilaian menurut kriteria dan indikator kekumuhan, Maka Kawasan Kumuh Padei Laut memiliki jumlah nilai 53 untuk tingkat kekumuhan, sehingga kawasan permukiman kumuh Padei Laut termasuk dalam Klasifikasi prioritas 2: Sedang.



**Gambar 8. Peta Prioritas Kekumuhan Permukiman Kumuh Padei Laut**

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan utama terkait karakteristik fisik dan lingkungan permukiman kumuh dan penilaian prioritas tingkat kekumuhan permukiman kumuh Padei Laut, dapat disimpulkan bahwa prioritas tingkat kekumuhan Kawasan permukiman kumuh di Kawasan ini termasuk dalam kategori sedang atau prioritas 2. Klasifikasi hasil penilaian ini terutama di pengaruhi oleh rendahnya kualitas layanan penyediaan air minum baik terkait akses aman air minum maupun pemenuhan kebutuhan minimal individu, ketidakterseediaannya drainase termasuk rendahnya kualitas konstruksi, kurangnya pengelolaan sampah, serta tidak adanya system proteksi kebakaran. Temuan penelitian ini sekaligus mengkonfirmasi penelitian (Pollo, dkk, 2017; Nurcahyanti, dkk, 2010, yang menjelaskan terbaikannya fisik Kawasan dan rendahnya layanan infrastruktur dan utilitas permukiman di Kawasan pesisir. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kelemahan dalam kedalaman analisis terutama belum memasukkan variabel pertimbangan lain dan status lahan yang mana, berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk penilaian komprehensif prioritas kekumuhan suatu Kawasan permukiman. Selain itu, bervariasinya tingkat pembangunan di pulau-pulau kecil akibat intervensi kebijakan politik suatu daerah tentu saja memberikan implikasi yang berbeda terhadap tingkat kekumuhan permukiman di pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, kami, peneliti merekomendasikan untuk penelitian lanjutan yang mengakomodir poin-poin yang menjadi kelemahan tersebut..

## E. Referensi

- As' ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Christiawan, P. I. (2017). Entitas permukiman kumuh di wilayah pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 178-187.
- Falkland, C. Anthony. (1991). *Hydrology and Water Resources of Small Island: A Practical Guide*. Paris: UNESCO.
- Hehanusa, P.E. & Bakti, Hendra. (2005). *Sumber Daya Air di Pulau Kecil*. Bandung: LIPI Press.
- Nurcahyati, E. E., Surjono, S., & Kurniawan, E. B. (2010). Penataan Permukiman Nelayan Puger Ditinjau dari Aspek Kekumuhan. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2(2), 41-48.
- Pollo, J. Y., Tondobala, L., & Sela, R. L. (2017). KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH PESISIR STUDI KASUS: DESA LIKUPANG DUA DAN DESA LIKUPANG KAMPUNG AMBONG, KECAMATAN LIKUPANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA. *SPASIAL*, 4(1), 44-58.
- Rosmansyah, M., & Suska, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 210-222.
- Sumawidjaja, N., & Suherman, D. (2005). Ketersediaan Air sebagai Faktor Pembatas Pengembangan Pulau Mangole, Maluku Utara. dalam Hehanusa, P.E. dan Bhakti, Hendra. 2005. (eds) *Sumber Daya Air di Pulau Kecil*. Bandung: LIPI Press.
- Wardi Liza., Sushanti R. Ima., dan Widayanti H. B., (2014). Karakteristik dan Perubahan Pola Permukiman Nelayan Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan Kota Mataram. *Jurnal Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Mataram. Nusa Tenggara Barat.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.
- Wijayanti, W. P., & Pratomo, R. A. (2016). Adaptation of social-economic livelihoods in coastal community: The case of Mangunharjo Sub-district, Semarang City. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, 477-484.